EVALUASI PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

ILMATIA ZAFIRA ROSYADA
07011381419130

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOVEMBER 2018

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

EVALUASI PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG

SKRIPSI

Oleh:

ILMATIA ZAFIRA ROSYADA
07011381419130

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, November 2018

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Slamet Widodo,M.S.,M.M
NIP. 195811191985031003

Pembimbing II

Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si
NIP.108108272009121000

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Evaluasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Operasional Angkutan Barang*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 16 November 2018.

Palembang, 16 November 2018

Ketua:

1. Prof.Dr.H.Slamet Widodo,M.S.M.M .....
NIP. 195811191985031003

Anggota:

1. Sofyan Effendi, S.IP,. M.Si .....
NIP. 197705122003121003

2. Dr. Andries Lionardo, S.IP.,M.Si .....
NIP. 197905012002121005

3. Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA .....
NIP. 198108272009121002

Mengetahui:

Dekan FISIP	**Ketua Jurusan Administrasi Negara,**
Prof. Dr. Kagus Muhammad Sobri, M.Si	**Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,M PA**
NIP. 196311061990031001	**NIP. 198108272009121002**

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN

اللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

" O Allah! There is nothing easy except what you make easy, and you make the difficult easy if it be your Will."

"if i am wrong, educate me. dont belittle me"

Skripsi ini Saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Saya, Papa Elman dan Mama Rosediana.
2. Adik Saya Anisya dan adik Saya Arib.
3. Seluruh dosen yang senantiasa bersabar dalam membimbing Saya.
4. Sahabat Saya.
5. Almamater Saya.

ABSTRACT

This research is motivated by the low awareness of motorists/owners of goods transportation as the target group in complying with applicable regulations. This can be seen from the non-compliance of goods transportation to follow the procedures for transporting goods and adhering to traffic signs and completing the specified goods transportation vehicle, this problem occurs because there are no strict sanctions that are less able to provide a deterrent effect on the target group that violates the regulations . The purpose of the study was to find out how the Operational Arrangement of Goods Transport in the City of Palembang in the Application of Mayor Regulation Number 20 of 2014 in the City of Palembang. This study uses descriptive qualitative method, while for data collection techniques using in-depth interview techniques, documentation, and observation. The discussion was directed to find out the actual facts of how the Goods Transport Policy Evaluation was carried out. The results of the study show that the Evaluation of Policies related to the Operations of Goods Transport Operations has been carried out in accordance with the contents of the policy but is still not optimal in its application. The six evaluation variables are: Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Grading, Responsiveness and Determination.

Keywords: Evaluation, Operation of Freight Transport, Department of Transportasion

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Slamet Widodo,M.S.,M.M
NIP.195811191985031003

Pembimbing II

Sofyan Effendi. S.Ip,. M.Si
NIP.197705122003121003

Palembang, November 2018
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung,S.Sos.,M.PA
NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran pengendara/pemilik angkutan barang sebagai kelompok sasaran dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dar ketidakpatuhan angkutan barang untuk mengikuti tata cara pengangkutan barang dan mematuhi rambu lalu lintas serta melengkapi surat kendaraan angkutan barang yang sudah ditentukan, permasalahan ini terjadi karena belum adanya sanksi yang tegas sehingga kurang mampu memberikan efek jera bagi kelompok sasaran yang melanggar peraturan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Operasional Angkutan Barang di Kota Palembang dalam Penerapan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Pembahasannya diarahkan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya bagaimana Evaluasi Kebijakan Angkutan Barang tersebut dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Evaluasi Kebijakan terkait Pengaturan Operasional Angkutan Barang sudah dilaksanakan sesuai dengan isi kebijakan tetapi masih belum optimal dalam penerapannya. Enam variabel Evaluasi tersebut yakni: Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketetapan.

Kata Kunci : Evaluasi, Operasional Angkutan Barang, Dinas Perhubungan.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Slamet Widodo,M.S.,M.M
NIP.195811191985031003

Pembimbing II

Sofyan Effendi. S.Ip,. M.Si
NIP.197705122003121003

Palembang, November 2018
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung,S.Sos.,M.PA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yaitu Elman S.pd dan Rosdiana S.pd.,M.kes yang selalu mendoakan dan memberi dukungan baik secara moril maupun materil serta semangat, motivasi, bimbingan, kepercayaan, dan kasih sayang selama ini yang tiada henti.
3. Saudara perempuan Anisya Dwi Yulianti., saudara laki-laki M.Arib Madani Alhafizh, dan seluruh sanak keluarga yang tiada henti selalu mendoakan dan memberi semangat, bimbingan, dan dukungan baik secara moril maupun materil selama ini kepada saya.
4. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Widodo,M.S.,M.M_selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Wakil Dekan II yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, yang sabar dalam memberikan solusi terbaik, memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis selama bimbingan.
7. Bapak Drs. Mardianto M.Si. selaku Dosen Penguji I Seminar Usulan Skripsi dan bapak Zailani Surya Marpaung,S.Sos.,MPA selaku Dosen Penguji II Seminar Usulan Skripsi saya yang telah banyak memberikan masukan agar penulisan skripsi saya dapat lebih baik.
8. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen
9. Bapak Joko Siswanto M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, yang sabar dalam memberikan solusi terbaik, memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis selama bimbingan dan proses perkuliahan.
10. Seluruh Dosen, Staf, dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.
11. Bapak Kurniawan, AP., M.Si. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang beserta seluruh jajarannya.
12. Bapak Fadrulanni SH selaku Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Lalu Lintas Angkutan kota beserta seluruh jajarannya.
13. Bapak Indra Suryadi SH.,M.Si selaku Kepala Seksi Angkutan beserta seluruh jajarannya.
14. Seluruh keluarga besar H.Ansyori Yoesof dan keluarga besar Matduni Hamzah
15. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya khususnya *Gengsterek* (Yeyen Dwi Valeta, Belta Ramadhona, Vinta Putriana R. Goce, Tasya Yunita, Syifariani Debi Junianti, Indah Yuan Sari).

16. Teman saya My*Pb* (Nobri Pratama, Apriyandi,Tezar Arisandi, Meilan Fernando,Alvi syahrin,Pantra Wijaya,Lepta Destori,Riski Amanda,Fajrah Madonna), *MyCb* (Chika saputri, Lembayung Sutita, Dwi Meilisa, Riskha Rahmayanti, Mekanidianti, Ani Yulia, Nur Octaviani, Dea Anggi)

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran dari semua pihak demi skripsi ini. Semoga Skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat di kemudian hari sebagai referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Palembang, November 2018
Penulis

Ilmatia Zafira Rosyada
NIM. 07011381419130

DAFTAR ISI

Halaman Judul ..... **i**
Halaman Persetujuan Pembimbing ..... **ii**
Halaman Persembahan ..... **iii**
ABSTRACT ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
Kata Pengantar ..... **vi**
Daftar Isi ..... **viii**
Daftar Gambar ..... **x**
Daftar Tabel ..... **xi**
Daftar Lampiran ..... **xii**
Daftar Singkatan dan Istilah ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori 7
1. Administrasi Negara 7
2. Kebijakan Publik 8
3. Evaluasi Kebijakan Publik 10
4. Fungsi Evaluasi Kebijakan 13
5. Pendekatan Evaluasi Kebijakan 13
6. Teori-Teori Evaluasi Kebijakan 14
B. Teori Evaluasi yang digunakan dalam penelitian 16
C. Operasional Angkutan Barang 24
D. Penelitian Terdahulu 25
E. Kerangka Pemikiran 27

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 30
B. Defenisi Konsep 30
C. Fokus Penelitian 31
D. Jenis dan Sumber Data 33
E. Informan Penelitian 33
F. Teknik Pengumpulan Data 35
G. Teknik Keabsahan Data 37
H. Teknik Analisis Data 38

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum 43
1. Gambaran Umum Kota Palembang 51

a. Visi dan Misi Kota Palembang 55
2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Palembang 56
a. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Palembang 56
b. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang 57
c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palembang..... 61

B. Hasil dan Pembahasan 55
1. Efektivitas 56
a. Pencapaian Tujuan Kebijakan 56
b. Pencapaian Kegiatan Penertiban Kebijakan Angkutan Barang..... 59
2. Efesiensi..... 70
a. Sumber Daya Finansial..... 70
b. Sumber Daya Manusia..... 73
3. Kecukupan 77
a. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pengawasan Kebijakan Angkutan Barang 78
4. Perataan 83
a. Koordinasi atau Kerja Sama Instansi Dalam Penerapan Kebijakan Angkutan Barang 83
5. Responsivitas 87
a. Tanggapan Masyarakat Terhadap Kebijakan Operasional Angkutan Barang..... 87
b. Tanggapan Kelompok Sasaran Terhadap Kebijakan Operasional Angkutan Barang..... 89
6. Ketetapan 90
a. Dampak Kebijakan Operasional Angkutan Barang..... 91

BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan..... 93
B. Saran..... 95
DAFTAR PUSTAKA 96
LAMPIRAN 99

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Tiga Elemen Sistem Kebijakan 11
2. Kerangka Pemikiran 31
3. Lambang Kota Palembang 43
4. Susunan Struktur Dinas Perhubungan Kota Palembang 48
5. Lembar Peraturan Walikota Palembang Tentang Pengaturan Angkutan Barang di Kota Palembang 60
6. Surat Tugas Penertiban Angkutan Barang 64
7. Pelaksanaan Penertiban Angkutan Barang di Kota Palembang 65
8. Surat Izin Usaha Angkutan Barang 66
9. Lembar Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 67
10. Lembar Berita Acara Penahanan Kendaraan 69
11. Kupon BBM Dinas Perhubungan 72
12. SOP Perlengkapan Kebijakan Angkutan Barang 79
13. Lalu Lintas di Kota Palembang 92

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Jumlah Kendaraan di Kota Palembang.....2
2. Jumlah Angkutan Barang Uji Kir di Kota Palembang 4
3. Jumlah Angkutan Barang yang Melanggar Peraturan di Dinas Perhubungan Kota Palembang 6
4. Model Evaluasi Kebijakan Menurut W.Dunn 19
5. Penelitian Terdahulu.....28
6. Fokus Penelitian 34
7. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Perhubungan Kota Palembang.....54
8. Jumlah Non Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Kota Palembang.....54
9. Pembuatan Surat Izin Usaha Dinas Perhubungan Kota Palembang.....58
10. SOP Penyidikan dan Penindakan Lalu Lintas 63
11. Jumlah Pegawai Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas 74
12. Daftar Nama Pegawai Seksi Penyidikan dan Penindakan.....76
13. Prasarana Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional.....79
14. Sarana Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional 80
15. Fasilitas Pendukung.....82
16. Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Pengawasan Angkutan Barang 86

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara 100
2. Pedoman Observasi 104
3. Pedoman Dokumentasi 106
4. Surat Dosen Pembimbing Skripsi 107
5. Surat Izin Penelitian dari FISIP UNSRI 108
6. Surat Izin Penelitian dari Badan KESBANGPOL 109
7. Surat Balasan Penelitian dari Dinas Perhubungan Kota Palembang 110
8. Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing I 111
9. Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing II 112
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi 113
11. Peraturan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengaturan Operasional Angkutan Barang di Kota Palembang 131

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

KIR	: Pengujian Kendaraan Bermotor
DISHUB	: Dinas Perhubungan
Review	: Ulasan
Input	: Masukan
Kasi	: Kepala Seksi
Kasubag	: Kepala Sub Bagian
LLAJ	: Lalu Lintas Angkutan Jalan
Output	: Keluaran
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
ASDP	: Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
IU	: Izin Usaha
PT	: Perseroan Terbatas
ST	: Surat Tugas
SOP	: Standar Operasional Prosedur
JP	: Jadwal Ploting
THL	: Tenaga Harian Lepas
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
SDM	: Sumber Daya Manusia
TJR	: Transportasi, Jalan, dan Rel
WASDALOPS	: Pengawasan dan Pengendalian Operasional
DIKDAK	: Penyidikan dan Penindakan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Palembang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan kegiatan pusat beragam, memerlukan dukungan prasarana kota yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatannya dalam sehari - hari, baik yang bertujuan didalam kota maupun yang bertujuan keluar kota. Transportasi di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang selalu meningkat, mulai dari mobil pribadi,mobil angkutan penumpang, dan mobil angkutan barang. Bisa dibayangkan dengan jumlah transportasi yang ada di Kota Palembang jika seperempat dari kendaraan tersebut beroperasi atau melintasi jalan di Kota Palembang bagaimana kepadatan yang terjadi setiap hari.

Transportasi darat yang menjadi salah satu penyumbang permasalahan kemacetan lalu lintas adalah angkutan barang. Angkutan barang di Kota Palembang yang tidak mematuhi dan mentaati peraturan lalu lintas memberikan andil yang cukup besar menjadi penyebab kemacetan dan/atau permasalahan lalu lintas di Kota Palembang. Maka dari itu, Pemerintah Kota Palembang melakukan upaya untuk mengatasi kemacetan dan kesemerawutan permasalahan lalu lintas di Kota Palembang. Upaya pemerintah tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Transportasi. Pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi mengatur kebijakan tentang Operasional angkutan barang yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban lalu lintas serta mengatasi permasalahan lalu lintas di Kota Palembang.

Tujuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Transportasi berkaitan dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 20

Tahun 2014 Tentang Operasional Angkutan Barang yang bertujuan menciptakan ketertiban lalu lintas khususnya angkutan barang.

Seiring dengan perkembangan zaman mengakibatkan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk baik yang datang dari luar Kota Palembang maupun yang disebabkan angka kelahiran. Sebagian besar dari orang - orang, telah memanfaatkan kesempatan kepadatan penduduk tersebut sebagai mata pencarian perekonomian mereka dengan menyediakan sarana transportasi umum, kendaraan umum dan kendaraan angkutan barang. Jumlah transportasi yang terus meningkat namun tidak di imbangi dengan pemanfaatan lahan atau penambahan jalan menyebabkan berbagai permasalahan lalu lintas seperti kemacetan lalu lintas, kecelakaan, dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan jumlah kendaraan di Kota Palembang.

Tabel 1 Jumlah Kendaraan di Kota Palembang

No.	**Jenis Kendaraan**	**Jumlah(unit)**				
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Sepeda Motor	697.150	821.614	854.213	897.462	930.142
2.	Angkutan Penumpang					
	- Umum	2.995	3.178	3.453	3.986	4.132
	- Pribadi	124.568	138.217	138.881	140.117	140.326
3.	Angkutan Barang					
	- Umum	8.420	9.571	9.952	10.287	10.645
	- Pribadi	56.254	59.461	59.754	60.261	61.047
4.	Bus					
	- Umum	2.645	2.655	2.678	2.698	3.215
	- Bukan Umum	1.328	1.347	1.355	1.378	1.393
5.	Kendaraan Roda Tiga					
	- Umum	6	9	14	17	22
	- Bukan Umum	842	1.285	1.420	1.773	2.124
	Jumlah Total	894.208	1.037.337	1.071.720	1.117.979	1.153.046

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2016.

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan di Kota Palembang terus meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah kendaraan tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang ada dijalan,sehingga menyebabkan kemacetan dan kecelakaan

serta pelanggaran lalu lintas. Penyebab utama yang sering terjadi yaitu banyaknya pengguna jalan transportasi darat yang melanggar dan tidak mematuhi tata tertib lalu lintas, termasuk mobil angkutan barang yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas dan juga ketentuan dalam proses pengangkutan barang.

Fenomena angkutan barang yang melanggar aturan lalu lintas sudah bukan rahasia umum lagi, padahal berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Pada kenyataannya meskipun kebijakan sudah ada angkutan barang di Kota Palembang masih sering ditemukan melakukan pelanggaran yang di nilai dapat menimbulkan kerugian, dan berdampak buruk pada kelancaran lalu lintas. Resiko keselamatan pengguna jalan lainnya dan kerusakan jalan menjadi semakin serius karena truk mengalami modifikasi dan melanggar aturan dalam pengangkutan barang. Setelah dilakukan Uji KIR selesai dilaksanakan, semua mobil angkutan barang harus menjalani uji kelayakan kendaraan secara berkala (Uji KIR), yang dilaksanakan di balai pengujian oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang. Uji KIR ini dilakukan untuk beberapa pemeriksaan seperti; fungsi rem, lampu, dan ban. Akan tetapi, setelah proses pemeriksaan banyak pemilik mobil angkutan barang yang melakukan modifikasi terhadap mobil mereka agar bisa memuat barang melebihi batas beban muatan yang ditentukan. Berikut ini jumlah kendaraan yang uji KIR.

Tabel 2 Jumlah Kendaraan Uji Kir di Kota Palembang

No.	Jenis Kendaraan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Jml. Kendaraan	Jml. Yang Kir	Jml. Kendaraan	Jml. Yang Kir	Jml. Kendaraan	Jml. Yang Kir	Jml. Kendaraan	Jml. Yang Kir	Jml. Kendaraan	Jml. Yang Kir
1.	Mobil Penumpang	3.414	3.365	2.874	2.832	2.718	2.679	2.694	2.641	2.645	2.593
2.	Mobil Bus	2.120	2.085	1.898	1.870	1.562	1.540	1.443	1.415	1.178	1.132
3.	Mobil Bus T. Umum	310	307	262	259	272	269	288	282	276	271
4.	Mobil Barang	2.278	2.252	3.736	3.683	5.018	4.945	6.685	6.554	5.525	5.417
5.	Mobil Barang T. Umum	43.938	43.290	46.916	46.224	51.576	50.815	52.390	51.694	53.270	52.225
6.	Mobil Khusus. TU	5.486	5.407	5.448	5.369	5.028	4.955	4.848	4.753	4.393	4.307
7.	Kereta Tempel	78	75	81	79	62	61	80	82	90	92
8.	Kereta Gandeng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total	57.624	56.781	61.215	60.316	66.236	65.264	68.428	67.421	67.377	66.037

Sumber : Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Palembang

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 masih banyak kendaraan angkutan barang yang tidak melakukan Uji Kir secara rutin. Tahun 2012 total jumlah kendaraan 57.624 sedangkan jumlah kendaraan yang melakukan Uji Kir 56.781 berarti 843 kendaraan yang tidak melakukan Uji Kir, Tahun 2013 total jumlah kendaraan 61.215 sedangkan jumlah kendaraan yang Uji Kir 60.316 berarti total kendaraan yang tidak melakukan Uji Kir 899, Tahun 2014 total jumlah kendaraan sebanyak 66.236 sedangkan kendaraan yang melakukan Uji Kir 65.264 berarti total kendaraan yang tidak melakukan Uji Kir sebanyak 972 kendaraan, selanjutnya tahun 2015 total jumlah kendaraan 68.428 dan jumlah kendaraan yang melakukan Uji Kir sebanyak 67.421 berarti jumlah keseluruhan kendaraan yang tidak melakukan Uji Kir sebanyak 1.007 kendaraan, pada tahun 2016 total jumlah kendaraan 67.377 sedangkan jumlah kendaraan yang melakukan Uji Kir 66.037 berarti total keseluruhan kendaran yang tidak melakukan Uji Kir sebanyak 1.340 kendaraan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa mobil angkutan barang yang tidak melakukan Uji Kir setiap tahunnya meningkat, Sehingga timbul lah berbagai macam pelanggaran yang dilakukan pengendara mobil angkutan barang yaitu melanggar ketentuan dalam pengangkutan, melanggar rambu lalu lintas, dan modifikasi kendaraan. Modifikasi ini dilakukan dengan memperpanjang chasis, dan menggunakan ban yang lebih kuat dan tidak standar, serta tidak memasang suku-suku cadang tambahan. Satu-satunya bagian yang sangat sulit untuk memodifikasi adalah as. Oleh karena itu, as akan mendapat tekanan yang berat akibat beban yang terlalu berat, dan sering patah. Muatan sumbu terberat ini berkaitan langsung dengan kerusakan jalan dan risiko rem blong yang akan meningkatkan angka kecelakaan dan merugikan pengguna jalan lainnya.

Berikut ini tabel jumlah angkutan barang yang melanggar peraturan di Dinas Perhubungan Kota Palembang, sebagai berikut :

Tabel 3 Jumlah angkutan barang yang melanggar peraturan di Dinas Perhubungan Kota Palembang

No.	Jenis kendaraan	Jan				Feb				Maret				April			Mei			Juni				Jumlah
		8	**15**	**22**	**29**	**5**	**12**	**19**	**26**	**4**	**11**	**18**	**25**	**1**	**8**	**15**	**13**	**20**	**27**	**3**	**10**	**17**	**24**	
1.	Dump Truck	17	1	15	2	6	4	2	25	10	5	7	3	4	5	3	5	1	-	1	3	-	1	115
2.	Truck/Light Truck	17	2	7	1	5	14	-	14	6	1	6	5	4	2	7	10	2	2	4	7	1	3	120
3.	Pick Up/Box	6	4	6	4	7	7	7	9	1	2	8	4	7	8	1	2	1	7	4	4	4	5	108
4.	Kaisar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
5.	Tangki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Jumlah	**40**	**7**	**28**	**7**	**18**	**25**	**9**	**48**	**17**	**8**	**21**	**13**	**16**	**15**	**11**	**17**	**4**	**9**	**9**	**15**	**5**	**9**	**379**

No.	Jenis kendaraan	Agustus		September					Oktober			November	Desember	Jumlah
		11	**19**	**2**	**9**	**16**	**23**	**30**	**6**	**14**	**22**	**25**	**27**	
1.	Dump Truck	-	10	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	15
2.	Truck/light truck	1	11	-	-	6	4	2	-	3	4	-	-	31
3.	Pick up/Box	2	3	2	4	4	2	3	-	2	5	6	6	66
4.	Kaisar	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
5.	Tangki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Jumlah	**3**	**25**	**2**	**4**	**10**	**11**	**5**	**0**	**7**	**9**	**6**	**7**	**89**

Sumber: *Kepala bidang Pengendalian dan Operasi Dinas Perhubungan Kota Palembang 2016.*

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa pada tahun 2016 masih banyak kendaraan angkutan barang yang melanggar peraturan. Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh kendaraan angkutan barang yaitu melanggar jaringan lintas. Jaringan Lintas merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang ruas jalan yang boleh di lalui dan tidak boleh di lalui oleh kendaraan angkutan barang. Jaringan Lintas kota Palembang di atur di dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Rute(Jaringan Lintas) Mobil Barang Dalam Kota Palembang. Selain dari permasalahan jaringan lintas terdapat juga permasalahan yang sering terjadi yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh angkutan barang, misalnya melakukan perpanjangan surat izin dan masalah peraturan dalam proses pengangkutan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Operasional Angkutan Barang yang menetapkan setiap angkutan barang wajib mematuhi ketentuan jaringan lintas, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, berhenti dan parkir, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain. Serta khusus untuk angkutan barang yang mengangkut tanah dan pasir wajib untuk menutup bak barang berupa terpal. Permasalahan saat ini terdapat masih banyak angkutan barang yang melanggar jaringan lintas, tidak memperpanjang surat perizinan angkutan serta pelanggaran lalu lintas lainnya. Oleh karena itu, dapat dibuktikan dari data pelanggaran angkutan barang yang penulis paparkan diatas.

Permasalahan yang lain yaitu Dinas Perhubungan Kota Palembang melaksanakan Penertiban dengan melakukan razia tetapi masih ada saja angkutan barang yang melakukan kesalahan yang sama, hal ini terjadi karena kurang tegasnya sanksi yang diterapkan. Sanksi yang diterapkan berupa penarikan izin usaha dan sistem tilang. Serta pelanggaran yang sering dilakukan juga karena tidak patuhnya pihak pemilik/pengemudi angkutan barang.

Berdasarkan latar belakang inilah menimbulkan keinginan dan minat peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang Evaluasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengaturan Operasional Angkutan Barang di Kota Palembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskanlah permasalahan, sebagai berikut : "Bagaimana Pengaturan Operasional Angkutan Barang di Kota Palembang dalam Penerapan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 di Kota Palembang?"

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk "Mengetahui Pengaturan Operasional Angkutan Barang di Kota Palembang dalam Penerapan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 di Kota Palembang".

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan, khususnya ilmu di perguruan tinggi terkait ilmu administrasi Negara khususnya ruang lingkup evaluasi kebijakan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang. Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan, meningkatkan kemampuan dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama diperkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik Pengantar.* Bandung: Cv Pustaka Setia.

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy Edisi Keempat.* Jakarta: Elex Media Komputindo

Dunn, William. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta CV.

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS(Center of Academic Publishing Service).

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Al Fatih, Andy. 2014. *Modul Mata Kuliah Metode Penelitian*. Palembang: FISIP Universitas Sriwijaya.

Tim Penyususn. 2014. *Pedoman Penelitian Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara.* Indralaya: FISIP Universitas Sriwijaya.

Subarsono, 2008. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Edward, III. 1980. *Implementasi Public Policy*. Washington DC : Congresional Quarter Press.

Solichin, Abdul Wahab. 1997. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Malang.

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Transportasi.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Operasional Angkutan Barang.

Skripsi:

Lestari,Apriza Wana. 2013. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Supir Angkutan Barang yang Tidak Memarkirkan Kendaraannya di Terminal yang Telah Disediakan.*Skripsi.Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Online)

Idris,Sri Wahyuni. 2016. *Manajemen Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah*: Skripsi.Makassar.FISIP Universitas Hasanuddin. (Online)

Mitasari. 2015. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Jembatan Timbang Batulajang Kota Pontianak*: Skripsi.Pontianak.FISIP Universitas Tanjung Pura. (Online)

Jurnal

Poni Sukaesih, dkk. 2016. *Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lilma(PKL) Di Kota Bandung,* (Online), (http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/699/jbptunikompp-gdl-theodorusg-34913-1-unikom_t-i.pdf).

Angga. 2015. *Penertiban Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekan Baru,* (Online), (http://download.portalgaruda.org/article.php?article=295159&val=6444&title=PENERTIBAN%20LALU%20LINTAS%20DAN%20ANGKUTAN%20JALAN%20DI%20KOTA%20PEKANBARU).

Rahmi Hasyfi, dkk. 2015. *Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Kota Di Kota Padang*, (Online), (https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4411/jurnal..pdf?sequence=1**)**

Internet

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 2015. *Portal Resmi Pemerintah Sumatera Selatan*, (Online), (http://sumselprov.go.id).

Pemerintah Kota Palembang. 2016. *Portal Resmi Pemerintah Kota Palembang*, (Online), (http://palembang.go.id).

Hidayantii. Imelda. 2014. *Definisi Dan Ruang Lingkup Sarana Dan Prasarana*, (Online), (anitahidayantii.blogspot.com/2014/09/definisi-dan-ruang-lingkup-sarana-dan.html)